

EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Udiyati Ardiani, Supardal

Program Studi Magister Pemerintahan Daerah, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
"APMD"

ABSTRACT

The institutional arrangement of regional apparatus organizations with the principles of proportional, effective and efficient has now become a major issue. It is hoped that the institutional arrangement of the regional apparatus will become an effective organization in carrying out its roles and duties and functions. Each Regency/City area has its own uniqueness and different characteristics, the need for workloads and regional capabilities are also different. However, on the other hand, local governments are also required to make adjustments to existing regulations, so that in the process there is a gap between the needs and capabilities of the regions and the demands of policies from the central government. Based on the results of the institutional arrangement of the Yogyakarta City Regional Secretariat, there are additions, subtractions and mergers of the Organizational Structure so that it is necessary to examine the current Organizational Structure of the Yogyakarta City Regional Secretariat, whether it is in accordance with organizational needs, supports the Vision and Mission of the City of Yogyakarta and provides a logical and effective grouping. The research method used is descriptive qualitative research. The results showed that the organizational structure of the Yogyakarta City Regional Secretariat was prepared by considering the principles of effectiveness and efficiency according to the needs and capabilities of the region. The Yogyakarta City Regional Secretariat is included in a Type A institution, in its implementation the Regional Secretariat's organizational structure is not optimized according to Type A but becomes a Regional Secretary, 3 Assistants, 8 Sections with each consisting of 3 Subdivisions. In the implementation, there are still obstacles that are found that the duties and functions of the People's Welfare Section and the Development Administration Section are not yet understood, this happens because there is still duplication of duties with other technical regional apparatuses.

Keywords: Evaluation, Organizational Structure, Work Procedure

ABSTRAK

Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan prinsip proporsional, efektif, dan efisien kini telah menjadi isu utama. Penataan kelembagaan diharapkan perangkat daerah menjadi organisasi yang efektif dalam menjalankan peran serta tugas dan fungsinya. Tiap daerah Kabupaten/Kota memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan terhadap beban kerja dan kemampuan daerah juga berbeda. Namun, di sisi lain, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk melaksanakan penyesuaian terhadap regulasi yang ada, sehingga dalam prosesnya menimbulkan gap antara kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan tuntutan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil penataan kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ada penambahan, pengurangan dan penggabungan Struktur Organisasi sehingga perlu diteliti terkait Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang ada sekarang, apakah sesuai dengan kebutuhan organisasi, menunjang Visi dan Misi Kota Yogyakarta serta memberikan pengelompokan yang logis dan efektif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta termasuk dalam kelembagaan Tipe A, dalam implementasinya struktur organisasi Sekretariat Daerah tidak di optimalkan sesuai dengan Tipe A tetapi menjadi Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 8 Bagian dengan masing

– masing terdiri atas 3 Subbagian. Dalam pelaksanaan masih ditemukan kendala bahwa belum dipahaminya ketugasan dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Administrasi pembangunan, hal tersebut terjadi karena masih ada duplikasi ketugasan dengan perangkat daerah teknis lainnya.

Kata Kunci: Evaluasi, Struktur Organisasi, Tata Kerja

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pemerintah daerah pada era desentralisasi sekarang ini diberi kebebasan yang luas dalam menentukan bentuk organisasi dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan urusan yang diampu dalam Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, diperlukan satuan organisasi (Wasistiono,2003;11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan memiliki satu arti penataan berasal dari kata dasar tata, penataan merupakan suatu proses perencanaan, penyusunan, pengaturan dalam upaya meningkatkan, keteraturan, ketertiban, dan keamanan (Badudu, Zein 1995:132), penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi mencapai tujuan. sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal) Penataan organisasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan; apabila lingkungan stabil dan hanya mengalami sedikit perubahan, maka penataan organisasi tidak harus perlu berubah akan tetapi kalau lingkungan berubah secara signifikan dan sangat mempengaruhi maka penataan organisasi menjadi sangat penting. ada dua pendekatan untuk

mengevaluasi atau mengukur penataan organisasi, yaitu pendekatan tujuan (*the goal approach*) dan pendekatan menurut teori sistem (*the system theory approach*). Menurut pendekatan tujuan, efektivitas organisasi (*organizational effectiveness*) diartikan atau dimaknai sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain menurut pendekatan ini bahwa tingkat pencapaian tujuan itulah menunjukkan tingkat efektivitas organisasi.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota/Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. perencanaan program, perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
6. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
8. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
9. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
10. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai visi Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang ketujuh dengan

sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Indikator sasaran daerah tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat juga mendukung dalam pencapaian sasaran daerah keberdayaan masyarakat meningkat dan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun.

Sejalan dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah, berimplikasi pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mewadahnya. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai organisasi yang mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat/instansi vertikal pemerintah daerah maka organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan otonomi daerah, demokrasi, desentralisasi maupun isu *good governance*. Untuk itu diperlukan suatu struktur kelembagaan bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, yang menyangkut visi dan misi organisasi, struktur organisasi sampai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang disusun sedemikian rupa dalam perwujudan

tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan penelitian analisis terhadap Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang ada sekarang, apakah sesuai dengan kebutuhan organisasi, menunjang Visi dan Misi Kota Yogyakarta serta memberikan pengelompokan yang logis dan efektif.

Dalam rangka membedah berbagai permasalahan terkait evaluasi struktur dan fungsinya dalam sekretariat daerah, maka dipaparkan beberapa konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

1. Struktur Organisasi

Menurut Siswanto (2005;85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.

Pengertian struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai sub unit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan organisasi (Rivai, 2010; 409). Berbagai desain struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan

mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai sasaran organisasi. Berkaitan dengan hal di atas maka yang dimaksud struktur adalah *“Structure is the arrangement or interrelation of all the parts of a whole; manner of organization or construction.”*, struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan di koordinasi secara formal, dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa *“Organization structure defines how tasks are to be allocated, who reports to whom, and the formal coordinating mechanisms and interaction patterns that will be followed.* Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur, struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang mengoordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi. Sedangkan struktur dalam konteks group adalah: standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunikasi, dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit

organisasi, yang sering digambarkan melalui bagan (Rivai, 2010; 358).

Berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi secara formal dibagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan berdasarkan kedekatan rumpun dan kewenangannya. Struktur organisasi merupakan gambaran bagaimana suatu organisasi membagi tugas dan pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan serta mengatur siapa yang mengerjakan tugas dan pekerjaan, juga menggambarkan kedudukan dan jenis wewenang pejabat dan hubungan pola koordinasi baik secara eksternal maupun internal.

2. *Penataan Organisasi*

Penataan organisasi merupakan wujud perubahan organisasi dengan cara menata kembali organisasi, baik sumber daya manusianya maupun strukturnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Penataan organisasi vertikal diartikan memperpanjang atau memperpendek tingkatan suatu organisasi, sedangkan penataan organisasi horizontal dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah bagian atau bidangnya. Menurut French dan Bell, penataan organisasi merupakan sebuah proses yang sistemik

yang melibatkan banyak faktor termasuk diantaranya adalah perilaku dan praktik organisasi yang tujuannya adalah mempengaruhi terjadinya peningkatan kompetensi organisasi yang lebih baik (LAN,2020;25).

Sementara itu, Robbins mengelompokkan penataan organisasi ke dalam empat kategori, yaitu, (1) Penataan struktur, yaitu mencakup perubahan dalam hubungan wewenang, mekanisme koordinasi, rancang ulang pekerjaan atau variabel struktural serupa; (2) Penataan teknologi, yaitu meliputi modifikasi dalam cara kerja yang diproses dalam metode serta peralatan yang digunakan; (3) Penataan setting fisik yaitu perubahan organisasi yang meliputi pengaturan ulang ruang dan tata letak tempat kerja; dan (4) Penataan orang, yaitu berkaitan dengan perubahan sikap, keterampilan, target kinerja, pola komunikasi, persepsi dan perilaku pegawai (LAN,2020;56).

Dari beberapa pernyataan diatas, penataan organisasi perangkat daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan atau mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Artinya, dengan penataan organisasi diharapkan perangkat daerah

menjadi organisasi yang efektif dalam menjalankan peran serta tugas dan fungsinya

3. Konsep Evaluasi Implementasi Kebijakan

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi implementor kebijakan publik gagal memahami maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Lester dan Steward (Winarno, 2016: 192) bahwa: “Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan”.

Dalam bahasa yang lebih singkat Jones (Winarno, 2016: 192) menyatakan bahwa “Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan”. Masih dalam buku yang sama, Anderson menyatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Lebih lanjut dijelaskan oleh Nugroho (2012:736) bahwa: “Evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi

kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan”.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Dalam penelitian ini, evaluasi yang dilakukan berfokus pada implementasi dari struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, sehingga penelitian ini berusaha mengungkap permasalahan secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong (2012:4). Obyek penelitian yang diteliti adalah analisis struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan subjek penelitiannya adalah segenap aparat sekretariat Kota Daerah yang memahami secara detail terkait dengan tugas pokok fungsi sekretariat daerah Kota Yogyakarta. Analisis data dimulai dengan memaparkan struktur sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dan dikaitkan dengan fungsi sesuai masing-masing struktur sekretariat daerah dengan kinerjanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Urusan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah penduduk (jiwa)	409.487	600	10	60
Luas wilayah (km ²)	33	200	5	10
Jumlah APBD	1.741.299.934.341 1	1.000	5	50
Jumlah Kecamatan	14	600	15	90
Jumlah Desa/Kelurahan	45	200	5	10
Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan)	34	800	20	160
Jumlah kebijakan Daerah yang masih berlaku	564	1.000	15	150
Jumlah pegawai ASN pada instansi pemerintah daerah	7.538	800	10	80
Jumlah APBD	1.741.299.934.341 1	1.000	15	150
Total Skor				760
Pengali				1.1
Total				836

Sumber Data: Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan urusan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebesar 836, dimana

berdasarkan kriteria tipologi Sekretariat Daerah merupakan Tipe A. Selanjutnya, pembentukan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tipe A ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomo 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah Kota
 Yogyakarta.

Tabel.2 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TIPELOGI			URUSAN YANG DIAMPU
	A	B	C	
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	√			1. Kesekretariatan Pemerintah Daerah 2. Unsur Kebijakan Pemerintah Daerah

Sumber : Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan hasil pemetaan besaran beban kerjanya dan hasil perhitungan urusan pemerintah daerah dengan kriteria tipologi berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tipologi termasuk dalam Tipe A. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tipe A untuk mewedahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri

Nomor 56 Tahun 2019, susunan organisasi Sekretariat Daerah Tipe A dapat dibentuk paling banyak 3 Asisten yang masing – masing terdiri atas 4 Bagian. Jadi secara jumlah maksimalnya bisa dibentuk 12 Bagian yang masing – masing terdiri atas 3 Subbagian. Tetapi dalam Perwal No. 93 Tahun 2020 susunan organisasi hanya dibentuk 8 Bagian dengan masing – masing terdiri atas 3 Sub bagian.

Perbandingan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi kelembagaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Struktur Organisasi Sekretariat daerah

No	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	No	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
1	Sekretaris Daerah	1	Sekretaris Daerah
A	Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas	A	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

No	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	No	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
	1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Pemerintahan Umum; b) Subbagian Otda dan Bina Adm Kecamatan; dan c) Subbagian Bina Kesejahteraan Rakyat. 		1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Administrasi Pemerintahan; b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan c) Subbagian Otonomi Daerah.
			2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Bina Mental; b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan c) Subbagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
	2. Bagian Hukum, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Perundang-undangan; b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 		3) Bagian Hukum, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Perundang-undangan; b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
B	Asisten Perekonomian, terdiri atas:	B	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
	1. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah; b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan c) Subbagian Sistem dan Prosedur. 		1) Bagian Perekonomian dan Kerjasama, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; b. Subbagian Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan c. Subbagian Kerja Sama Daerah.
	2. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD; b) Subbagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan c) Subbagian Kerjasama 		2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Kebijakan Pembangunan; b. Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

No	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	No	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
	3. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan c) Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 		3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan c. Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
C	Asisten Umum	C	Asisten Administrasi Umum, terdiri atas
	1. Bagian Protokol, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Penatalaksanaan Acara; b) Subbagian Administrasi Kepala Daerah; dan c) Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli. 		1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli; b. Subbagian Protokol; dan c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
	2. Bagian Umum, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan c) Subbagian Rumah Tangga. 		2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah; b. Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan c. Subbagian Administrasi Umum
	3. Bagian Organisasi, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Subbagian Kelembagaan; b) Subbagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur; dan c) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik. 		3) Bagian Organisasi, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; b. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan c. Subbagian Reformasi Birokrasi.

Sumber: hukum.jogjakota.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan dalam susunan organisasi yang lama dengan yang baru. Bertambahnya jumlah Bagian dan adanya Bagian yang digabung dilakukan untuk penguatan koordinasi kebijakan Daerah,

sehingga upaya pencapaian target kinerja RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 dapat lebih efektif dengan tetap berpedoman pada Permendagri No. 56 Tahun 2019, walaupun ada beberapa

nomenklatur dan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Adanya penyesuaian urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat untuk Kota yang tidak diampu dalam sebuah Dinas melainkan dilaksanakan di Kecamatan atau Kemantren sehingga terkait kebijakan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat diwadahi dalam Bagian yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat. Selain mengampu kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat, Bagian ini juga gabungan sebagian urusan yang semula ada di Bagian Tata Pemerintahan yaitu urusan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan kerjasama menjadi Bagian Perekonomian dan Kerjasama karena urusan pengembangan pendapatan asli daerah digabung dalam Perangkat Daerah yang mengampu urusan keuangan daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adanya tambahan urusan kebijakan ekonomi kreatif juga menambah beban kerja Bagian Perekonomian dan Kerjasama.

Bagian Umum dan Bagian Protokol bergabung karena kedekatan fungsi sehingga menjadi Bagian Umum dan

Protokol, dan pengampu keuangan Sekretariat Daerah menjadi Bagian Keuangan yang mengampu urusan administrasi keuangan Sekretariat Daerah. Urgensi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan untuk menyelaraskan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan penugasan pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut pelaksanaan urusan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan perangkat daerah Sekretariat Daerah, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan pembentukan kelembagaan Sekretariat Daerah juga mendasarkan pada peraturan menteri dalam negeri tersebut untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah yang disesuaikan dengan hasil kajian kelembagaan khususnya berkaitan dengan aspek analisis beban kerja dan analisis jabatan dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah Sekretariat Daerah.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tersebut ditemui beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain:

1. Lamanya proses penyusunan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, hal tersebut disebabkan pembahasan struktur organisasi dan tuis yang cukup lama mencapai kesepakatan antara

Bagian-Bagian yang ada di Sekretariat Daerah dengan Bagian Organisasi selaku pengampu perumus penataan kelembagaan.

2. Belum ada kesepakatan dalam menginterpretasikan keluasan atau penjabaran pada beberapa urusan pemerintahan yang diampu oleh Bagian-Bagian yang ada di Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya pemahaman tugas dan fungsi Sekretariat Daerah seperti yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan. Ada tuis yang terlalu teknis yang lebih baik dilaksanakan oleh Dinas bukan Bagian yang harusnya sebagai penyiap kebijakan Sekretaris Daerah.
4. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan seperti perubahan regulasi atau kebijakan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Apalagi dengan adanya rencana terkait penyederhanaan birokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan analisis terhadap Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta setelah dilakukan penataan kelembagaan sesuai dengan

regulasi yang ada dapat disampaikan ada beberapa Bagian yang kurang optimal yaitu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat perlu pemetaan ketugasan karena masih bersinggungan dengan ketugasan yang ada. Di Dinas dari urusan yang diampu Bagian dan Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan karena ada ketugasan yang seharusnya lebih baik dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait pengendalian program dan kegiatan perangkat daerah.

Berdasarkan pembahasan analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penataan kelembagaan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sudah berjalan baik. Adanya komunikasi efektif dengan pimpinan dan pengampu sebagaimana disampaikan bahwa adanya proses komunikasi dari pimpinan sejak tahun 2019 terkait penataan kelembagaan keistimewaan jauh sebelum Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 diterbitkan. Keterlibatan pimpinan secara intensif dalam pembahasan susunan organisasi Sekretariat Daerah menunjukkan adanya

komitmen dan kejelasan disposisi dari pimpinan dan Tim Evaluasi kepada Bagian Organisasi selaku pengampu perumus penataan kelembagaan perangkat daerah. Koordinasi atau struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Dalam hal penataan kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dilakukan untuk dapat menyesuaikan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta dengan RPJMD Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin. 2004. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1999. *Teori organisasi*. Jakarta: STIA-Lembaga Administrasi Negara Press
- Budi Winarno. 20017. *Kebijakan Publik: teori dan proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Creswell, J. W. 2009. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Edward III, George C. (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. London-England. Jai Press Inc.

- Gibson L. James, dkk, 1989. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Gouillart, F.J dan Kelly, J.N. 1995. Transforming The Organization. New York Mc GrawHill Inc.
- Handyaningrat. 1991. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung
- Kasim A. 2019. Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan). Jurnal Akrab Juara, 4(1), 1-17
- LANRI. 2020. Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah. Jakarta. Indonesia
- Manullang A. Laurence. 2014. Teori dan Aplikasi Manajemen: Komprehensif Integralistik, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. USA. Scott Foresman and Company.
- Moleong Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Reksohadiprojo, Soekanto dan Hani Handoko. 1996. Organisasi perusahaan: teori, struktur dan perilaku. Yogyakarta, BPF
- Robbins, Stephen, P. 2008. Perilaku Organisasi: Organizational Behavior. Jakarta. Salemba Empat
- Prentice Hall, edisi kesepuluh Sabardini, 2006, Peningkatan Kinerja Melalui Perilaku Kerja Berdasarkan Kecerdasan Emosional, Telaah Bisnis, Vol.7, No.1.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, H., 1997, Manajemen Suatu Pengantar, Alumni Bandung
- Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung R&D Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.